

Papan Reklame Besar akan Dicotot Di Jalan Utama

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta tidak akan mengeluarkan lagi izin pemasangan papan reklame berukuran besar di Ibu Kota. Pemasangan iklan akan dialihkan ke layar *light-emitting diode* (LED).

“Ya kita pengen seperti model televisi kabel. Jadi kami yang akan menyediakan LED, juga iklannya. Jadi kalau mau pasang iklan ke kami, bayarnya per detik seperti televisi, tapi lebih murah daripada televisi. Jadi semua iklan bentuknya seperti televisi kabel,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat rapat dengan asosiasi pengiklan Jakarta di Balai Kota, kemarin.

Ya kita pengen seperti model televisi kabel. Jadi kami yang akan menyediakan LED, juga iklannya.

Selama ini para pengiklan memasang papan reklame dengan membayar per papan. Tarif iklan itu sesuai dengan lama pemasangan papan. Ahok berharap pemasangan iklan dengan LED bisa lebih teratur. Nantinya papan reklame di jalanan Jakarta akan dicopot dan diganti dengan LED.

Ia pun meminta para pemasang iklan tidak menyuap PNS dalam perizinan iklan

dan harus patuh membayar pajak iklan.

Peraturan itu, lanjut Ahok, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak iklan sekaligus menata kota terutama ruas Jalan Sudirman-Thamrin.

Menurutnya, iklan LED yang dipasang di jalan-jalan, gedung, bus, atau ruangan-ruangan bisa meningkatkan penerimaan pajak Pemprov DKI. “Penerimaan pajak bisa berlipat, maunya lima sampai enam kali lipat,” tukasnya.

Untuk itu, dia sudah memerintahkan jajarannya agar tidak menerima perpanjangan atau lelang iklan. Jika kontrak pengiklan selesai, Pemprov DKI Jakarta segera mencopot papan reklame. “Jangan suap PNS kami, pertemuan ini bukan keputusan sepihak. Kalau suap, terkutuklah dia,” kata Ahok.

Dia menambahkan peraturan tersebut tidak berlaku untuk iklan kecil (*billboard*) yang telah membayar pajak. Selain itu, penempatan iklan LED hanya berlaku untuk ruas Jalan Sudirman-Thamrin.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Serikat Pengusaha Reklame Jakarta Didi Oerip Affandi mendukung rencana tersebut agar tata Kota Jakarta menjadi lebih baik dan terpantau. “Pemasangan iklan tidak ada pengawasan. Hampir 80% peletakan iklan tidak sesuai dengan titik koordinatnya,” kata Didi.

Namun, ia meminta Pemprov DKI memikirkan kembali rencana tersebut karena pemasangan iklan memerlukan LED dan listrik. (Bob/*-/J-4)